

IMPLEMENTASI PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM (PSKBA) PADA PENANGANAN BENCANA KEBAKARAN DI KABUPATEN KARANGASEM

I Putu Khrisna Adi Widnyana Putra¹, I Dewa Ayu Putri Wirantari²
juniorsdps01@gmail.com¹, putriwirantari@unud.ac.id²
Universitas Udayana

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Program Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) oleh Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinas Sosial P3A Provinsi Bali, dengan studi kasus penanganan bencana kebakaran di Kabupaten Karangasem. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dengan staf Bidang Linjamsos sebagai penanggung jawab dalam kegiatan PSKBA serta dokumentasi kegiatan penanganan bencana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PSKBA pada kasus kebakaran di Kabupaten Karangasem telah diawali dengan asesmen kebutuhan korban, penyaluran bantuan logistik sesuai kebutuhan, pendampingan sosial, serta koordinasi lintas instansi dengan pemerintah kabupaten dan relawan. Penelitian ini menunjukkan bahwa peran Bidang Linjamsos sangat penting dalam memastikan perlindungan sosial bagi korban kebakaran dapat diberikan secara cepat dan tepat sasaran.

Kata Kunci: Perlindungan Sosial, Bencana Kebakaran, PSKBA, Linjamsos.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the Social Protection Program for Victims of Natural Disasters (Program Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam/PSKBA) carried out by the Division of Social Protection and Social Security (Linjamsos) of the Social Affairs, Women Empowerment, and Child Protection Office of Bali Province, with a case study on the handling of a fire disaster in Karangasem Regency. This research employs a descriptive qualitative method, with data collected through in-depth interviews with Linjamsos staff who are directly responsible for the implementation of PSKBA, as well as documentation of disaster response activities. The findings indicate that the implementation of PSKBA in the fire disaster case in Karangasem Regency began with a needs assessment of the affected victims, followed by the distribution of logistics assistance based on identified needs, social assistance, and inter-agency coordination with the regency government and volunteers. The study highlights that the role of the Linjamsos Division is crucial in ensuring that social protection for fire disaster victims is delivered promptly and in a targeted manner.

Keywords: Social Protection, Fire Disaster, PSKBA, Linjamsos.

PENDAHULUAN

Bencana alam merupakan peristiwa yang tidak dapat diprediksi dengan pasti dan berpotensi mengakibatkan kerugian besar, baik secara fisik, sosial, maupun ekonomi. Dampak dari bencana tidak hanya dialami dalam bentuk kerusakan infrastruktur, tetapi juga dalam terganggunya kehidupan sosial masyarakat, menurunnya tingkat kesejahteraan, serta meningkatnya kerentanan kelompok yang rentan. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang terdampak melalui berbagai program perlindungan sosial. Dalam konteks nasional, pengaturan perlindungan sosial di Indonesia diatur dalam beragam kebijakan, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 mengenai Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang membahas Penanggulangan Bencana.

Regulasi tersebut menekankan bahwa pemerintah memegang tanggung jawab atas pelaksanaan perlindungan sosial bagi para korban bencana melalui distribusi bantuan darurat, pemenuhan kebutuhan dasar, serta upaya rehabilitasi sosial setelah bencana. Program perlindungan sosial untuk para penyintas bencana pada dasarnya meliputi bantuan logistik, layanan psikososial, jaminan kehidupan sementara, dan pendampingan sosial. Selain bencana alam seperti banjir dan gempa bumi, kebakaran juga merupakan salah satu bentuk bencana yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat terkhususnya kebakaran pemukiman. Bencana kebakaran seringkali menyebabkan korban kehilangan tempat tinggal, harta benda, serta menimbulkan tekanan psikologis akibat kejadian yang terjadi secara tiba-tiba. Oleh karena itu, penanganan bencana kebakaran membutuhkan respons yang cepat, tepat, dan terkoordinasi, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar korban dan pendampingan sosial.

Dalam konteks Provinsi Bali, salah satu kejadian kebakaran yang memerlukan penanganan perlindungan sosial terjadi di Kabupaten Karangasem. Pada kejadian tersebut, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinas Sosial P3A Provinsi Bali turut terlibat langsung dalam kegiatan penanganan korban kebakaran melalui Program Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA). Keterlibatan ini mencakup asesmen kebutuhan, penyaluran bantuan logistik, serta pendampingan sosial terhadap korban terdampak. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan kajian pada implementasi PSKBA dalam penanganan bencana kebakaran di Kabupaten Karangasem sebagai bentuk pembahasan dari lingkup Provinsi ke studi kasus di tingkat Kabupaten.

LANDASAN TEORI

A. Teori Implementasi Kebijakan

Teori implementasi kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini berlandaskan gagasan George C. Edwards III (1980). Edwards menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap implementor, dan struktur birokrasi..

B. Konsep Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial merupakan upaya yang diambil oleh negara untuk melindungi masyarakat dari ancaman sosial yang dapat menurunkan kualitas hidup, termasuk ancaman bencana alam. Menurut Holzmann dan Jorgensen (2000), perlindungan sosial merupakan suatu bagian dari manajemen risiko sosial (social risk management) yang dimana memiliki tujuan sebagai membantu rumah tangga, masyarakat, maupun individu sendiri dalam menghadapi risiko, mengurangi dampak kerentanan terhadap bencana yang akan datang lagi, serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola risiko tersebut.

Indikator Perlindungan Sosial dalam PSKBA meliputi:

1. Ketepatan sasaran penerima bantuan, yaitu kemampuan pada program dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang benar-benar terkena dampak dari bencana ini dan sesuai dengan data hasil evaluasi di lapangan.
2. Kecepatan penyaluran bantuan darurat, yaitu seberapa cepat bantuan kebutuhan dasar seperti sandang dan pangan yang dapat disalurkan kepada korban sejak terjadinya bencana tersebut.
3. Kecukupan bantuan yang diberikan, yaitu jumlah dan jenis bantuan apakah sudah sesuai dengan masyarakat yang akan diberikan bantuan di lokasi terdampak.
4. Kualitas layanan pendampingan sosial, yaitu bentuk dukungan sosial yang diberikan kepada korban bencana, baik berupa psikososial, maupun bantuan pemulihan sosial.

5. Koordinasi antarinstansi dalam penanganan korban, yaitu tingkat kerjasama antara Bidang Linjamsos dengan lembaga penanganan korban bencana seperti Tagana, pemerintah daerah, serta lembaga lainnya.

METODOLOGI

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara mendalam bagaimana proses implementasi Program Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) pada bencana kebakaran yang terjadi di Kabupaten Karangasem. Pendekatan deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai pelaksanaan program, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam perlindungan sosial bagi korban bencana.

Lokus penelitian berada di Dinas Sosial P3A Provinsi Bali terkhususnya di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos). Pemilihan lokasi ini didasari oleh pertimbangan bahwa Bidang Linjamsos merupakan unit pelayanan langsung dalam pelaksanaan PSKBA di tingkat provinsi, dimulai dari pendistribusian bantuan hingga pendampingan bagi korban bencana. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari laporan kegiatan seperti SPJ (Surat Perjalanan Dinas), peraturan yang berlaku dan literatur yang relevan dengan penelitian ini.

Proses analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, melalui tahapan seperti pengumpulan data, presentasi data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Untuk memastikan data tersebut valid atau tidak, maka penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan teknik yaitu dengan membandingkan hasil wawancara, pengamatan, dan dokumentasi agar data yang diperoleh akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Perlindungan Sosial bagi Korban Bencana Alam (PSKBA) merupakan sebuah layanan yang bergerak dengan tujuan menyediakan bantuan dan dukungan pemulihan bagi masyarakat yang terkena bencana. Ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, bantuan darurat, serta pendampingan sosial untuk kelompok rentan. Dalam lingkup Provinsi Bali, pelaksanaan PSKBA menjadi tanggung jawab Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) di Dinas Sosial P3A Provinsi Bali yang berperan sebagai pelaksana teknis di lapangan. Bidang Linjamsos melaksanakan berbagai tugas, seperti melakukan evaluasi cepat mengenai kondisi korban, melakukan verifikasi atau koordinasi terkait kebutuhan mendesak, serta menyalurkan bantuan logistik dari gudang sosial provinsi, dan memberikan layanan pendampingan sosial dan berkoordinasi juga dengan TAGANA (Taruna Siaga Bencana), BPBD, serta pemerintah Kabupaten atau Kota. Dengan mekanisme ini, PSKBA di Bali tidak hanya berfungsi sebagai bantuan darurat, tetapi sebagai upaya yang terstruktur dalam mitigasi dan pemulihan sosial bagi masyarakat yang terkena dampak dari bencana tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penanggung jawab kegiatan PSKBA di Bidang Linjamsos yaitu ibu Ni Nyoman Suarningsih, A. Ks, bidang Linjamsos selalu melakukan asesmen sebelum turun ke lapangan, termasuk membuat SOP dan menyerahkannya kepada Dinas Sosial Kabupaten atau Kota yang wilayahnya terdampak bencana. Asesmen ini mencakup identifikasi jumlah korban, tingkat kerusakan, serta kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi. Asesmen ini juga dilakukan kembali setelah petugas tiba di lokasi untuk menyesuaikan bantuan tambahan seperti santunan ahli waris atau kebutuhan spesifik kelompok rentan. Temuan ini menunjukkan bahwa proses asesmen kebutuhan telah menjadi

tahap awal yang wajib dilakukan dan menjadi dasar penentuan bantuan dalam PSKBA

Bantuan disalurkan langsung kepada korban berdasarkan data kebutuhan yang telah di asesmen oleh petugas Kabupaten. Bantuan logistik terutama mengandalkan bufferstock dari kemensos, dan sejauh ini Bali tidak pernah mengalami kekurangan bantuan dalam kejadian bencana yang relatif kecil dan menengah. Bantuan yang diberikan mencakup pangan, sandang, dan kebutuhan dasar lainnya. Namun petugas mencatat bahwa mereka tidak dapat memastikan kecukupan bantuan apabila skala bencana lebih besar dari prediksi, karena stok sangat bergantung pada pusat. Meskipun demikian, ketepatan bantuan dianggap lebih baik karena selalu disesuaikan dengan data asesmen yang sudah dilakukan pihak kabupaten.

Hambatan yang dirasakan saat melaksanakan kegiatan PSKBA ini dapat dilihat dari akses menuju lokasi bencana, terutama kondisi geografis sulit dijangkau. Namun secara umum, penyaluran bantuan tidak pernah mengalami keterlambatan yang signifikan. Petugas yang turun langsung dalam kegiatan ini menjelaskan bahwa mereka bergerak pada tiga fase: pra-kejadian (sosialisasi), saat kejadian (turun ke lapangan), dan pascakejadian (asesmen lanjutan). Koordinasi dengan pihak Kabupaten sangat menentukan akses ke lokasi, karena kabupaten merupakan pemegang wilayah dan pihak yang memastikan kondisi teknis di lapangan. Temuan ini menunjukkan bahwa aksesibilitas layanan cukup baik, namun tetap dipengaruhi kondisi geografis dan alur koordinasi.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pendampingan sosial merupakan suatu hal yang bisa dibilang susah dikarenakan sebagian korban bencana masih mengalami trauma psikologis sehingga belum siap menerima pendampingan sosial secara langsung. Petugas harus menyesuaikan pendekatan, menghormati kondisi emosional korban, dan menunggu hingga mereka siap menerima pendampingan. Upaya pemulihan psikologis dilakukan dengan mengajak masyarakat kembali pada aktivitas normal agar tidak larut dalam dampak trauma. Temuan ini menegaskan bahwa dukungan psikososial sangat penting dalam implementasi PSKBA, dan petugas dari Bidang Linjamsos memiliki pendekatan empatik dan adaptif dalam menghadapi kondisi korban.

Setiap kegiatan harus berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten atau Kota karena kewenangan wilayah berada di tingkat Kabupaten. Ketika bantuan diperlukan dari UPD lain, koordinasi dilakukan melalui kabupaten terlebih dahulu. Respons terhadap bencana juga bersifat situasional, meskipun ada kejadian bencana secara mendadak, petugas dari pihak provinsi wajib mengikuti alur dari kabupaten yang terkena bencana. Pembagian tugas antarpetugas juga sudah direncanakan seperti staf pihak gudang menangani bantuan logistik, sedangkan Bidang Linjamsos dan TAGANA menangani asesmen serta pendampingan psikososial korban bencana. Struktur koordinasi ini membuktikan bahwa respons PSKBA di Bali bersifat cepat namun tetap terikat pada prosedur kewilayahan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Program Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) oleh Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinas Sosial P3A Provinsi Bali telah berjalan secara sistematis dan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan sosial. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis indikator, pelaksanaan PSKBA diawali dengan asesmen kebutuhan yang dilakukan secara berjenjang melalui koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten atau Kota sebagai pemegang kewenangan wilayah. Proses ini memastikan bahwa bantuan yang disalurkan sudah sesuai dengan kebutuhan para korban. Bantuan logistik umumnya memadai karena bufferstock yang tersedia sudah memenuhi kapasitas, meskipun ketergantungan pada ketersediaan pusat tetap menjadi potensi keterbatasan apabila terjadi bencana berskala besar.

Aksesibilitas layanan bantuan bagi korban bencana tergolong baik, meskipun kondisi geografis tertentu dapat menjadi hambatan dalam mempercepat distribusi. Di samping itu, pendampingan sosial dan dukungan psikososial menjadi aspek penting dalam implementasi program, mengingat kondisi emosional korban yang seringkali tidak stabil. Petugas dari Bidang Linjamsos mampu melakukan pendekatan yang adaptif dan empatik untuk membantu pemulihan psikososial masyarakat terdampak. Dari sisi kelembagaan, koordinasi antarinstansi, terutama antar provinsi, kabupaten atau kota, BPBD, dan TAGANA, berjalan efektif dan menjadi kunci keberhasilan respons bencana. Pembagian tugas yang jelas serta struktur birokrasi yang tertata mendukung kelancaran penanganan di lapangan.

Secara keseluruhan, Implementasi PSKBA di Provinsi Bali telah memenuhi indikator perlindungan sosial, baik dari aspek asesmen kebutuhan, kecukupan bantuan, aksesibilitas layanan, pendampingan sosial, maupun koordinasi antarinstansi. Meskipun demikian, penelitian ini juga mengungkapkan perlunya penguatan kapasitas logistik daerah, peningkatan kesiapsiagaan lintas lembaga. Serta optimalisasi mitigasi berbasis komunitas agar penanganan bencana di masa mendatang dapat berlangsung lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa peran Bidang Linjamsos sebagai pelaksana PSKBA di tingkat provinsi sangat strategis dalam memastikan keberlangsungan perlindungan sosial bagi korban bencana alam di Bali.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2020). Buku saku penanggulangan bencana. BNPB. <https://bnpb.go.id/uploads/2020/06/Buku-Saku-Penanggulangan-Bencana.pdf>
- Dwihartanto, D., Gunawan, W., & AS, Z. A. (2025). PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN BENCANA TANAH LONGSOR DI KABUPATEN BANDUNG BARAT. *Jurnal Prinsip: Jurnal Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan*, 1(2).
- Fergina, A., Iskandar, A. P., Faturrahman, Y., & Pebrian, R. (2024). Pendampingan Psikososial Dan Trauma Healing Pasca Bencana Alam Gempa Bumi Di Desa Sarnpad, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. *Jurnal Abdi Nusa*, 4(2), 182-188.
- Hakim, M. L. (2021). Peran Dinas Sosial dalam Penyaluran Bantuan Sosial terhadap Korban Bencana Kebakaran di Kota Samarinda Tahun 2018. *JAP: Jurnal ADMINISTRASI PUBLIK*, 4(1), 199-211.
- Kuntjorowati, E. (2020). Dampak Bantuan Sosial Untuk Korban Bencana Alam Tanah Longsor Di Banjarnegara. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 44(1), 63-76.
- Latumahina, M. J. (2023). EFEKTIVITAS PENYALURAN LOGISTIK OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BAGI KORBAN BANJIR DI KOTA AMBON PROVINSI MALUKU (Doctoral dissertation, IPDN).
- Najwa, Y., Amanda, P. D., Fatmawati, F., Al-Kalam, S., & Wahyudi, S. N. (2024). Analisis Efektivitas Program Perlindungan Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Kelompok Rentan di Indonesia. *Al-I'timad: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam*, 2(1), 1-20.
- ROZI, F. (2025). PERAN DINAS SOSIAL DALAM MEMPROSES PENYALURAN BANTUAN SOSIAL TERHADAP KORBAN BENCANA KEBAKARAN DI KABUPATEN KAMPAR (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).
- Sanjaya, F., Kurnia, D., & Yovinus, Y. (2025). KUALITAS PELAYANAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA (DISKARPB) DALAM PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN DI KABUPATEN PURWAKARTA. *Jurnal Prinsip: Jurnal Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan*, 1(2).
- World Bank. (2022). Shock-responsive social protection in Indonesia. World Bank. <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/shock-responsive-social-protection>